

# PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TERHADAP KINERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

**Firdaus Satria<sup>1)</sup>, Yamardi<sup>2)</sup>, Dahly Sukmapryandika<sup>3)</sup>**  
1,2,3) Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

## Abstrak

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Terhadap Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung” yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal terhadap kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal, penetapan Standar Pelayanan Minimal ini dilakukan tidak hanya berdasarkan jumlah target sasaran penerima layanan tetapi juga berdasarkan mutu minimal layanan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan eksplanatif, dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden, menggunakan teknik *Simple Random Sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif yang signifikan antara implementasi kebijakan SPM dan kinerja pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. Kendala utama yang diidentifikasi adalah keterbatasan sumber daya dan kompleksitas birokrasi yang memperlambat implementasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi anggaran, serta reformasi birokrasi guna memastikan efektivitas kebijakan. Implementasi strategi ini diharapkan dapat meningkatkan layanan pendidikan di Kabupaten Bandung secara signifikan, perbaikan ini juga akan mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan di wilayah tersebut.

**Kata Kunci:** *Implementasi Kebijakan, Standar Pelayanan Minimal, Pendidikan.*

## Abstract

*This study is entitled “The Effect of Minimum Service Standards Policy Implementation on the Bandung Regency Education Office” which aims to determine how much influence the implementation of the Minimum Service Standards policy has on the performance of the Bandung Regency Education Office. Regulation of the Minister Home Affairs Number 59 of 2021 concerning the implementation of Minimum Service Standards, the determination of Minimum Service Standards is carried out not only based on the number of target service recipients but based on the minimum quality of basic services that are absolute and easily standardized which every citizen is entitled to obtain. This study uses a quantitative method with an explanatory approach, with a sample size of 100 respondents, using the Simple Random Sampling technique. The results showed that there is a significant positive influence between the implementation policy and the performance of Bandung Regency Education Office employees. The main obstacles identified were limited resources and bureaucratic*

*complexity that slowed down implementation. Therefore, human resource capacity building, budget optimization and bureaucratic reform are needed to ensure policy effectiveness. The implementation of this strategy is expected to significantly improve education services and also support the improvement of the quality of education services.*

**Keywords:** Policy Implementation, Minimum Service Standards, Education.

## **PENDAHULUAN**

Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat tersebut salah satunya adalah melalui penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), merupakan program strategis pemerintah yang diperuntukkan untuk memperbaiki dan memperluas kualitas layanan publik di seluruh Indonesia. Dengan demikian, pemerintah menjamin bahwa masyarakat akan mendapatkan layanan yang minimal harus disediakan oleh masing-masing lembaga pemerintah. SPM juga memiliki tujuan untuk memperbaiki efisiensi dan efektivitas pemerintahan serta memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

Layanan pendidikan di Kabupaten Bandung masih jauh dari standar nasional. Karena itu, komitmen pada peningkatan layanan pendidikan berkualitas yang memenuhi standar nasional harus dipastikan yang dimulai dari terpenuhinya SPM. Daerah jangan puas dengan standar minimal, sebab pendidikan merupakan investasi bangsa untuk semua warga negara. Pemerintah harus punya komitmen kuat dalam menyediakan layanan pendidikan yang tinggi standarnya untuk membuat masyarakat mampu kompetitif. Pemerintah daerah juga harus memastikan semua warga negara termasuk dari keluarga miskin terpenuhi kebutuhan dasarnya. Pendidikan termasuk salah satu kebutuhan dasar untuk hidup layak yang harus dipenuhi negara.

SPM dalam bidang pendidikan merupakan aturan yang ditetapkan untuk memastikan bahwa setiap lembaga pendidikan menyediakan jaminan kualitas pendidikan yang diterima masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa segala instansi pendidikan menyediakan pelayanan yang bersahabat, terwujud dan memadai bagi seluruh masyarakat. Dalam konteks ini, SPM pendidikan terdiri dari beberapa aspek penting, seperti : 1. Akses dan kualitas pendidikan, menjamin bahwa setiap individu memiliki

kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan minat. 2. Personil pendidikan yang kompeten : memastikan bahwa guru dan staf lainnya disekolah memiliki kualifikasi, pendidikan dan pengalaman yang cukup untuk menghadirkan pelajaran yang baik dan membimbing siswa secara profesional. 3. Fasilitas dan infrastruktur : menjamin bahwa sekolah memiliki fasilitas dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk membantu pembelajaran dan pengembangan siswa, termasuk fasilitas kesehatan, sosial dan kesenian. 4. Kurikulum dan pembelajaran : menggariskan bahwa kurikulum yang digunakan disekolah harus mencakup berbagai aspek pendidikan, termasuk pembelajaran akademik, budaya dan nilai-nilai kehidupan. 5. Pengawasan dan evaluasi : menjamin adanya sistem pengawasan yang konsisten dan efektif untuk memantau kualitas pendidikan dan memperbaiki kemampuan lembaga pendidikan. 6. Kebijakan dan program sosial : menyediakan program sosial yang bertujuan untuk membantu siswa yang membutuhkan bantuan.

Dalam upaya mencapai standar pelayanan minimal di bidang pendidikan, Dinas pendidikan dan lembaga pendidik harus selalu mengembangkan dan mengoptimalkan program-program yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pendidikan dan menjamin akses yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dituntut dapat meningkatkan investasi pendidikan, memastikan akses terwujud bagi masyarakat dan membangun sistem pendidikan yang efisien. Hal ini melibatkan peningkatan kualitas pendidikan, memperluas fasilitas dan sarana belajar, meningkatkan gaji dan kelancaran pembayaran untuk guru.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui serta menganalisis tentang pengaruh implementasi kebijakan standar pelayanan minimal terhadap kinerja Dinas Pendidikan, sehingga diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan acuan pengembangan penelitian selanjutnya secara mendalam.

### **Implementasi Kebijakan**

Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta

memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif (Guntur, 2022). Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Definisi tersebut menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan kegiatan administratif yang legitimasi hukumnya. Pelaksanaan kebijakan melibatkan berbagai unsur dan diharapkan dapat bekerja sama guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

### **Kinerja**

Kinerja dalam organisasi merupakan pekerjaan yang berfungsi sebagai ukuran apakah tujuan yang dinyatakan telah tercapai atau tidak. Ketika ada sesuatu yang sangat buruk atau semuanya hanya semu, atasan atau manajer sering kali gagal untuk memahaminya. Sering juga manajer tidak menyadari seberapa banyak pekerjaan karyawan mereka telah memburuk, yang menyebabkan bisnis atau organisasi menghadapi krisis yang serius. Kesan-kesan organisasi buruk yang mendalam berakibat dan mengabaikan tanda-tanda peringatan adanya kinerja yang buruk. Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2006).

Kinerja pegawai merupakan hasil atau prestasi kerja pegawai yang dinilai dari segi kualitas maupun kuantitas berdasarkan standar kerja yang ditentukan oleh pihak organisasi. Jadi, kinerja pegawai merupakan hasil kerja yang diraih oleh seseorang dalam melakukan tugas-tugas yang dilimpahkan kepadanya atas dasar kecakapan, pengalaman dan waktu (Setiyawan & Waridin, 2009).

### **METODE PENELITIAN**

Rancangan penelitian diperlukan terlebih dahulu dalam melakukan serangkaian kegiatan ilmiah (Prasetyo, B, 2012). Berdasarkan pertanyaan penelitian yang dirancang adalah metode penelitian eksplanatif (penjelasan)

dengan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif yang pada dasarnya terdapat dua variabel yakni variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sedangkan variabel (Y) dalam penelitian ini adalah kinerja Dinas Pendidikan.

Definisi lain menyebutkan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Demikian pula pada tahap kesimpulan peneliti akan lebih baik bila disertai dengan gambar, tabel, grafik, atau tampilan lainnya (Siyoto, S, 2015).

Dalam penelitian ini populasi yang dibutuhkan terdiri dari guru, pengawas, penilik, dan pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan jumlah total sebesar 5.966 orang. Untuk mendapatkan jumlah sampel, peneliti menggunakan teknik *Simple Random Sampling* dengan *margin of error* yang diinginkan adalah 10% maka didapat sampel sebanyak 100 responden.

## **PEMBAHASAN**

Dalam penelitian ini, regresi linier digunakan untuk menganalisis pengaruh implementasi kebijakan standar pelayanan minimal terhadap kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. Tujuan utama dari regresi linier adalah untuk memprediksi nilai variabel dependen (kinerja dinas pendidikan) berdasarkan variabel independen (implementasi kebijakan standar pelayanan minimal) dengan cara menemukan persamaan garis lurus yang paling cocok (*fit*) dengan data yang ada.

Model regresi linier yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah implementasi kebijakan standar pelayanan minimal memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja dinas pendidikan di Kabupaten Bandung. Regresi linier mengasumsikan bahwa hubungan antara variabel independen dan dependen adalah linier, artinya perubahan pada variabel independen akan berhubungan dengan perubahan proporsional pada variabel dependen. Dalam hal ini, kebijakan yang

diterapkan diharapkan dapat meningkatkan kinerja dinas pendidikan secara signifikan.

**Tabel 1.1 Uji Regresi Linier**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Standard Error	Beta		
1 (Constant)	10,370	1,006		10,305	,000
x	,362	,061	,515	5,948	,000

a. Dependent Variable: y

*Sumber : Olahan Peneliti, 2025*

Berdasarkan hasil uji regresi, diperoleh koefisien konstanta (B) sebesar 10,370 dengan Std. Error sebesar 1,006. Koefisien konstanta ini menunjukkan bahwa ketika implementasi kebijakan standar pelayanan minimal (variabel x) bernilai nol, maka kinerja dinas pendidikan (variabel y) diperkirakan akan memiliki nilai sebesar 10,370.

Koefisien regresi untuk variabel x adalah 0,362 dengan Std. Error sebesar 0,061, yang berarti bahwa setiap kenaikan satu unit pada implementasi kebijakan standar pelayanan minimal akan meningkatkan kinerja dinas pendidikan sebesar 0,362 unit. Nilai Beta yang sebesar 0,515 menunjukkan bahwa pengaruh kebijakan tersebut terhadap kinerja dinas pendidikan cukup kuat setelah dilakukan standarisasi.

Selanjutnya, nilai t untuk x adalah 5,948 dengan nilai Sig. sebesar 0,000, yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa koefisien regresi untuk x signifikan secara statistik, mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan standar pelayanan minimal berpengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja dinas pendidikan Kabupaten Bandung.

Secara keseluruhan, hasil uji regresi linier ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan standar pelayanan minimal memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. Dengan demikian, kebijakan tersebut dapat dijadikan sebagai faktor yang penting dalam meningkatkan kinerja di sektor pendidikan di daerah tersebut

Berdasarkan hasil penelitian yang mengkaji Pengaruh Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terhadap Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, ditemukan bahwa faktor demografis, seperti usia, jenis kelamin, dan jabatan, memiliki pengaruh signifikan terhadap persepsi responden terhadap kebijakan tersebut. Kelompok usia muda, seperti peneliti yang berusia antara 20 hingga 30 tahun dan 30 hingga 40 tahun, cenderung lebih terbuka terhadap perubahan dan inovasi dalam kebijakan SPM. Kelompok usia ini umumnya memiliki sikap yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap pembaruan sistem pendidikan. Hal ini sejalan dengan temuan dalam studi oleh Vitri dan Wibawa (2022), yang menunjukkan bahwa kelompok usia muda memiliki kecenderungan lebih mendukung kebijakan SPM karena peneliti lebih mudah menyesuaikan diri dengan perubahan yang diusung oleh kebijakan tersebut. Pada kelompok usia lebih tua, seperti 40 hingga 50 tahun dan 50 hingga 60 tahun, terdapat kecenderungan lebih hati-hati dan konservatif dalam menilai kebijakan SPM, meskipun peneliti tetap menyadari pentingnya perbaikan kualitas pendidikan, C Setiawati (2018).

Hal ini memberikan gambaran bahwa kebijakan SPM berdampak signifikan pada kinerja Dinas Pendidikan. Salah satu faktor demografis yang signifikan adalah usia responden. Dalam penelitian yang dilakukan di Kabupaten Bandung, mayoritas responden berada dalam rentang usia produktif, yaitu 20-30 tahun dan 30-40 tahun. Kelompok usia ini cenderung lebih terbuka terhadap perubahan dan inovasi dalam kebijakan pendidikan. Peneliti memiliki perspektif yang lebih fleksibel dan mendukung kebijakan SPM yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pendidikan sebagaimana dijelaskan oleh Ahmad & Sari (2022).

Dari segi jabatan, responden yang memiliki posisi di tingkat kepala sekolah, pengawas, dan staf dinas pendidikan menunjukkan variasi dalam perspektif peneliti terhadap kebijakan SPM. Kepala sekolah dan pengawas, yang sering terlibat langsung dalam implementasi kebijakan di lapangan, cenderung memiliki pandangan yang lebih aplikatif terkait implementasi SPM.

Sementara itu, staf Dinas Pendidikan, yang lebih fokus pada kebijakan dan regulasi, memberikan pandangan yang lebih teknis dan berorientasi pada administrasi. Penelitian oleh Kusnadi (2022) dan Ahmad & Sari (2022) juga menyoroti pentingnya peran kepala sekolah dan pengawas dalam mendukung implementasi kebijakan pendidikan, karena peneliti adalah penghubung langsung antara kebijakan dan pelaksanaan di sekolah-sekolah. Di sisi lain, responden dari jabatan Pengawas memiliki perspektif yang lebih praktis terkait pelaksanaan kebijakan di lapangan. Peneliti menilai efektivitas implementasi kebijakan berdasarkan hasil di tingkat sekolah.

## **KESIMPULAN**

Secara keseluruhan, hasil uji regresi linier ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan standar pelayanan minimal memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Kendala yang dihadapi mencakup berbagai aspek, seperti kurangnya efektivitas komunikasi kebijakan antara pembuat kebijakan dan pelaksana di lapangan, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai, serta struktur birokrasi yang masih kaku dan kurang efisien. Meskipun demikian, terdapat beberapa indikator kinerja yang menunjukkan peningkatan, seperti kualitas kerja pegawai dan pelaksanaan tugas. Namun, indikator lainnya, seperti kuantitas kerja dan tingkat tanggung jawab pegawai, masih memerlukan perhatian lebih untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan SPM memerlukan penguatan pada aspek-aspek pendukungnya agar dapat memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap kinerja Dinas Pendidikan secara keseluruhan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Budiarto, A. (2021). Pengaruh Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Spm) Terhadap Pembangunan Manusia Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*.



- Guntur, S. (2022). *Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo.
- Mangkunegara. (2006). *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Refika Aditama
- Prasetyo, A. E., Andhika, & Iswahyudi. (2021). Strategi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dalam Pemerataan Tenaga Pendidik Untuk Memenuhi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten Biak Numfor. *Gema Kampus*, Vol. 16 No. 1.
- Prasetyo, B. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Setiawati, Esti. (2018). Studi Evaluatif Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar Di Kabupaten Bantul. *Trihayu: Jurnal Pendidikan Ke-Sd-An*, Vol. 4, No. 2.
- Setiyawan, & Waridin. (2009). Pengaruh Disiplin Kerja Karyawan dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja di Divisi Radiologi RSUP Dokter Karyadi Semarang. *JBRI*, Vol. 2 No. 1 .
- Siyoto, S. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Vitri, Oktaria, & Wibawa, Sutrisna. (2022). Implementasi Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Di Kapanewon Seyegan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. *Media Manajemen Pendidikan*, Vol 5 No. 2.